

**Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan
Payung Sekaki Kota Pekanbaru**

MIFTAHUR RIZQI

PEMBIMBING : Dra. Endang Sulistyaningsih

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax
(0761) 63277
Email:miftahur.rizqii@yahoo.com**

Abstrack : Plan and organize a family is a matter of humanity currently being sought its implementation by the Government and the People of Indonesia, including in the city of Pekanbaru, especially in Sub Umbrella Sekaki. Therefore made Family Program Planning for a Healthy and Prosperous Family creation. The problem in this study is How Evaluation Program Planning in Sub Umbrella Family Sekaki Pekanbaru. As for the purpose of this study was to determine the Evaluation of Family Planning Programs in Sub Umbrella Sekaki Pekanbaru. That researchers use theoretical concepts are and Evaluation Program. This study used qualitative research methods to the study of descriptive data. In collecting data, the researcher used interview techniques, observation and documentation. By using a key informant as a source of information and as a source of triangulation techniques in testing the validity of the data. The results of this study indicate that the Evaluation of Family Planning Programs in Sub Umbrella Sekaki Pekanbaru not running optimally. Factors affecting the implementation of family planning program in the District Umbrella Sekaki Pekanbaru City is still a lack of resources and lack of support facilities implementing the program implementation, communication, disposition, and a bureaucratic structure.

Keywords : Policy, Program Evaluation, KB (Family Planning)

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dalam Program Keluarga Berencana antara lain untuk mengendalikan tingkat kelahiran melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang lebih baik.

Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang terdiri dari empat Kelurahan, yaitu Labuh Baru Timur, Labuh Baru Barat, Tampan, Air Hitam. Didalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan Payung Sekaki termasuk salah satu kecamatan yang belum mencapai target pelaksanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program KB. Ditambah lagi, masih tingginya pertumbuhan dan kelahiran penduduk tidak sebanding dengan angka kematian. Selain itu, ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya Program KB di antaranya dipengaruhi tingkat pengetahuan ibu dan faktor pendukung lainnya.

Sebagaima gejala-gejala permasalahan yang ditemui, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian yaitu Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya kebijakan adalah bagian dari keputusan politik, yakni Program Perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat, pemerintah, dan penyelenggaran kebijakan sehingga kebijakan merupakan hasil kegiatan politik. Secara harfiah istilah kebijakan diterjemahkan dari kata "policy" yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintahan karena pemerintahan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, sekaligus bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan kepentingan publik itui sendiri yang dalam bahasa indonesia yang berarti pemerintahan, masyarakat atau umum.

Para ahli mejelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada definisi lain. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintahan sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintahan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Ini sesuai dengan pemikiran Carl Friedman yang mengatakan bahwa hal yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*) (Abidin, 2002).

Kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan tersebut trlah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Policy dalam arti yang bertugas mengendalikan negara dan strategi kekuasaan adalah hasil dari *outcome* dari proses sistem politik yang dapat

dinamakan output. Sistem politik dalam bentuk *action*, dan juga bisa desisi atau kebijakan. Dari konsep diatas, bahwa kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik.

Carl Friedrich dalam Winarno (2002) Mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2004) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanta terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbull sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Skema umum penilaian evaluasi adalah input, proses, output dan outcomes **Nurcholis (2005:146)**

- a. Input yaitu masukan yang perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 1. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)
 2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
- b. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditarnsformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 1. Tepat sasaran atau tidak
 2. Tepat guna atau tidak
 3. Efisien atau tidak
- c. Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tepat tidaknya sasaran yang dituju
 2. Berapa besar sasaran yang tercover
 3. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
 4. Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
- d. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:
 1. Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran
 2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
 3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut kebijakan ke tataran praktis dan operasional. Menurut **Edward (2003:32)** ia mengembangkan model didahului dengan dua permasalahan yang menjadi pertanyaan yaitu :

1. Kondisi – kondisi awal apakah yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi kebijakan.
2. Hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk menjawab dua pertanyaan itu Edward mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang penting , karena dalam setiap proses kegiatan yang

melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan dilakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan kebijakan, jika para personil bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bias efektif.

Disamping itu, harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber – sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena keefisienan struktur birokrasi yang ada.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap *even* merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah: (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik “*snowball sampling*” atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru karena masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana, padahal pemerintah, Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana (BPPMKB) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Payung Sekaki telah menjalankan Program Keluarga Berencana, yang mana Program tersebut berguna untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan keluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas akan menghasilkan generasi berikutnya yang berkualitas juga.

Keberhasilan Program Keluarga Berencana dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator antara lain :

1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas.

Yang dimaksud dengan kecil dalam misi ini adalah sikap dan tanggungjawab keluarga akan hari depannya sebagai pemahaman terhadap konsep kesehatan reproduksi. Khususnya usia yang baik untuk melahirkan adalah 20-30 tahun dengan jarak kelahiran yang ideal.

Untuk melaksanakan misi ini perlu diciptakan suasana kondusif agar masyarakat semakin memiliki kepedulian yang tinggi dan semakin kuat berperan dalam upaya-upaya pengaturan kelahiran melalui program KB, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kualitas anak untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang dilakukan berdasarkan kesadaran, kesukarelaan dan rasa tanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam kehidupan yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga, dan kualitas pelayanan.

Untuk melaksanakan misi ini maka perlu :

a. Didorong terjadinya kerjasama antar sektor baik pemerintah maupun swasta termasuk LSOM yang mempunyai fungsi dalam pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga

b. Dibantu terciptanya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kemampuan keluarga dalam melindungi anggota keluarganya dari pengaruh yang tidak sesuai dengan nilai sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

c. Didorong agar dapat tercipta kemitraan dalam upaya pengentasan penduduk/keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarganya.

d. Didorong terwujudnya upaya-upaya peningkatan kualitas anak terutama dalam memberikan pembinaan pola asuh yang tepat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Untuk melaksanakan misi ini maka perlu :

- a. Difasilitasnya secara berharap sesuai kemampuan pemerintah agar terselenggara pelayanan KB, konseling dan rujukan yang berkualitas sehingga memberikan kepuasan bagi penerima pelayanan maupun pemberian pelayanan.
 - b. Diberdayakan keluarga dan masyarakat sehingga memungkinkan terjadi peningkatan wawasan, dalam pemeliharaan dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas
4. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan mewujudkan hak-hak reproduksi.

Untuk melaksanakan misi ini maka perlu dilakukan advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan fasilitasi agar keluarga dan masyarakat mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan dan perlindungan hak-hak reproduksi guna mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan Program KB nasional.

Untuk melaksanakan misi ini perlu digerakkan dan difasilitasi upaya peningkatan status perempuan sehingga pasangan suami istri memiliki wawasan dan tanggungjawab bersama dalam memenuhi hak-hak reproduksi, pelayanan KB, kesehatan reproduksi serta kesejahteraan keluarga.

6. Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial sejak pembuahan sampai dengan lanjut usia

Untuk melaksanakan misi ini perlu diciptakan kondisi yang kondusif agar keluarga dan masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi dan berperan dalam pengembangan dalam sumber daya manusia potensial melalui tahapan penyiapan, peningkatan, penempatan, dan pemberdayaan potensi keluarga mulai dari pra nikah, kehamilan, balita, remaja, hingga lansia dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

7. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengelolaan pembangunan khususnya menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, perlu ditelaah dan dielaborasi informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, wawancara dengan narasumber, dan telaah dokumentasi di lokasi penelitian.

1. Input

Input yaitu masukan yang perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

- a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah Program yang dibentuk, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber-sumber tertentu dan sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini, dimana tanpa sarana dan prasarana yang memadai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan tentunya juga tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam hal ini dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk mempermudah operasional Program KB ini.

Dari Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa Input dari Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Payung Sekaki sudah optimal, karena seluruh bahan-bahan dan semua peralatan untuk Pelaksanaan Program KB sudah dilengkapi oleh Pemerintah. Namun demikian, masih ada masyarakat yang mengeluhkan kekurangan-kekurangan dalam hal peralatan KB yang dibantu oleh Pemerintah, masyarakat menilai Pemerintah kurang sepenuhnya mendukung Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Payung Sekaki. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program KB masih rendah.

2. Proses

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

a. Pelaksanaan Program KB tepat sasaran atau tidak

Pelaksanaan pada sebuah Program KB ini tepat atau tidaknya sasaran sangat dibutuhkan karena dengan cara ini program dapat dipublikasikan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana program itu, apa tujuannya dan semua hal mengenai program tersebut. Dan begitu pula dengan program KB. Program KB adalah sebuah program yang sasaran utamanya adalah masyarakat, jadi kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan.

b. Pelaksanaan Program KB tepat guna atau tidak

Program KB merupakan cermin dari upaya menurunkan tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan pada program KB ini dinilai tepat guna atau tidaknya dapat dilihat dari masyarakat yang mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program KB tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses dari Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki sudah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada hambatan. Dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui pentingnya Program Keluarga Berencana.

Kemudian kami dari pihak Pelaksana Program Keluarga Berencana akan selalu mendukung agar dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti, serta Pemerintah juga ikut mendukung penuh Program Keluarga Berencana ini.

3. Output

Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

Hasil-hasil yang akan diperoleh dari Pelaksanaan Program ini telah ditetapkan melalui hasil laporan yang ada di setiap Kelurahan pada Kecamatan Payung Sekaki, namun harus sesuai dengan yang kita harapkan agar sebuah Pelaksanaan Program berjalan dengan lancar.

a. Tepat tidaknya sasaran Pelaksanaan Program KB yang dituju

Tepat atau tidaknya suatu sasaran kegiatan sangat tergantung kepada proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dari Program yang telah ditentukan.

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian di Kecamatan Payung Sekaki ini sudah diketahui seberapa banyak Program yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlaksananya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori oleh Edward III. Edward III mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan kebijakan, meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Rosady Ruslan (2005 : 79) proses komunikasi dapat diartikan sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (*messages*) dari pengirim pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan), dengan catatan bahwa proses tersebut bertujuan tercapainya saling pengertian (*mutual understanding*) di antara kedua belah pihak. Sebelum pesan-pesan itu dikirim kepada komunikan, komunikator memberikan makna-makna dalam pesan tersebut (*decode*) yang kemudian ditangkap oleh komunikan dan diberikan makna sesuai dengan konsep yang dimilikinya (*encode*).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau petugas sosialisasi kepada masyarakat selaku pemanfaat Program Keluarga Berencana, masyarakat kurang paham dan tidak mengerti dengan arahan-arahan atau penyuluhan yang dilakukan petugas Pelaksana Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan adalah jumlah staff pelaksana yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, adanya fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, dan pelimpahan wewenang dari atasan kepada pelaksana di lapangan.

Walaupun tujuan atau isi dari kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fasilitas pendukung untuk kelancaran pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Kecamatan Payung Sekaki masih

kurang dimana untuk menjangkau empat kelurahan yang ada hanya disediakan kendaraan pribadi saja, sehingga penyuluh lapangan bergantian menggunakan fasilitas tersebut atau menggunakan kendaraan pribadi mereka. Selain itu, pelaksana program KB juga tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang kurang memadai tentu saja mempengaruhi kerja mereka dan menjadi jarang berkomunikasi secara langsung.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pelaksana program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki, penulis menyimpulkan dalam pemahaman pelaksana terhadap program Keluarga Berencana pelaksana masih memiliki pengetahuan ala kadarnya mereka hanya berpedoman pada pedoman umum pelaksanaan Keluarga Berencana. Hal ini masih disebabkan oleh faktor komunikasi yang belum lancar dan masih kurangnya pelatihan tentang kegiatan-kegiatan pada program keluarga berencana ini, padahal pelatihan sangat dibutuhkan bagi pelaksana kegiatan program Keluarga berencana ini agar pelaksana paham apa yang akan disampaikannya kepada sasaran program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Sub indikatornya adalah :

- a. Adanya prosedur pengoperasian standar (SOP) yang dapat membantu organisasi/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Adanya pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pelaksana program Keluarga berencana mengenai standar prosedur operasional program, penulis menarik kesimpulan bahwa SOP diberlakukan tetap terhambat pada fasilitas yang ada pada kecamatan Payung sekaki, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan KB di Rumah Sakit atau tempat yang memiliki fasilitas lebih lengkap, dengan demikian secara otomatis target terhitung pada kecamatan lain sehingga mengurangi pencapaian target Peserta KB aktif pada Kecamatan Payung Sekaki. Selain itu penghambat lainnya yaitu mengenai persepsi masyarakat tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini, yang mana masyarakat merasa takut akan dampak yang ditimbulkan oleh pemasangan alat kontrasepsi. Ketakutan masyarakat akan efek yang ditimbulkan dari pemasangan alat kontrasepsi yang digunakan sehingga hal ini menjadi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk ber-KB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan

bahwa Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Keluarga Berencana.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Payung Sekaki.
3. Sumber daya pendukung untuk Pelaksanaan Program Keluarga Berencana belum memadai.
4. Koordinasi yang dilakukan penanggung jawab pelaksana Program Keluarga Berencana belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan* , Bumi Aksara, Jakarta
- Darwis, Darlis SE, MM, 2011. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta
- Djojohadikusumo, Soemitro, 2007. *Ledakan Penduduk Mengancam Bangsa*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta
- Dunn N. William, 1999. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- _____ 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Publik Policy*, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
- Edwards III, George C.2003. *Administrasi Publik*. Gramedia : Jakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung
- Kuncoro, M. 1997. *Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mahbub. Djunaidi, 1982. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Michael H. Hart, 1978*. PT. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta
- Malthus, Thomas. 1798. *An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*,
- Moleong, Lexy. J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya. Bandung
- Nana Sudjana. 2006 . *Standar Mutu Pengawas*, Depdiknas. Jakarta
- Nugroho, D.Riant . 2004. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, PT. Efek Media Komputindo. Jakarta
- Notoatmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- _____ 2008. *Analisis Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Ritonga, Entjang. 2003. *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Perpustakaan Kemkes RI : Jakarta
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Santoso, Rachmat , 2011. *Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program Kependudukan dan Keluarga*

- Berencana Nasional, KKB SIDUGA (Sistem informasi Kependudukan dan keluarga), Jakarta.*
- Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suyono, Haryono. 2005. *Sinergi Baru Pemeberdayaan Keluarga*. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri : Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1989. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta, Malang